

## PKS DAN DINAMIKA POLITIKNYA

**Muh. Sholihin**

STIT Al-Mahsuni Danger Masbagik

[solihin@gmail.com](mailto:solihin@gmail.com)

### ABSTRAK

Berbicara tentang PKS seperti membahas jamaah tarbiyah yang ada di kampus-kampus dari segi gerakan dakwahnya dan kegiatan keagamaan yang ada dikalangan kaum terpelajar. Tetapi berbeda ketika berbicara PKS dari segi politik ini yang menjadi unik. Dikarenakan keberadaan PKS pasca orde baru sebagai bentuk gerakan politik jamaah tarbiyah untuk menaungi keinginan untuk ikut dalam memperbaiki bangsa dan Negara. Pada awalnya memang keberadaan PK ketika itu sebagai partai politik yang menjunjung nilai-nilai Islam dengan gerakan politiknya masih tertutup dan hanya dikenal oleh kalangan aktivis jamaah tarbiyah saja, makanya ketika pemilu 1999 PK hanya mendapatkan suara 1,6% hal ini menunjukkan bahwa keberadaan jamaah tarbiyah dalam politik PKS memberikan sumbangsih perolehan suara walaupun tidak signifikan. Oleh karenanya, PKS harus mampu melakukan upaya-upaya konsolidasi.

Langkah dan strategi yang dilakukan PKS untuk mengambil hati masyarakat, partai ini membuat jargon-jargon yang menarik seperti amanah, anti korupsi, bersih, selain itu aksi-aksi politik yang dilakukan seperti dengan menunjukan aksi-aksi solidaritas terhadap Palestina, Santunan sosial untuk komunitas Aksi pelayanan kesehatan Aksi general ceck up kesehatan Gelar pasar rakyat, pasar murah dan juga membantu musibah bencana seperti banjir. Langkah ini ternyata menuai perhatian masyarakat dan simpati, dianggap PKS menjadi harapan partai masa depan bangsa, simpati dan harapan masyarakat tersebut ditunjukan dengan memilih para kader PKS pada pemilu 2004 dan akhirnya PKS berhasil menghatarkan kadernya untuk melenggang ke kursi DPR RI, dengan keberhasilan PKS kinerja politik PKS dalam Pemilu 2004 tesebut maka kenaikan dari segi perolehan suara tingkat nasional PKS mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu mencapai 500%. Bahkan presiden PKS pada saat itu bisa menduduki ketua MPR-RI.

**Keyword:** Politik, PKS, Langkah, Strategi

### A. Langkah Politik dalam Melanggengkan Eksistensi

Menilik dari visi umumnya sebagai Partai dakwah dan visi khusus untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani. PKS sebenarnya mengembangkan konsepsi politik-Islam. Islam menjadi alat perjuangan sekaligus solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka untuk mengubah *image* tersebut, PKS membangun jaringan sosial sebagai sarana melanggengkan eksistensi politik di kancah perpolitikan nasional. Dari jaringan sosial yang dibangun oleh PKS dapat diklasifikasikan menjadi tiga jaringan. Pertama, model politisasi publik dengan pemanfaatan saluran politik formal yang didukung oleh sistem kaderisasi yang ketat dan solid. Model ini menguntungkan PKS karena mampu menyebarkan pencitraan dengan lebih baik mengenai kebenaran kampanye yang menanggapi berbagai

macam isu baik domestik atau internasional. Kedua, model penanaman kader yang bertanggung jawab untuk mengendalikan organ penyangga di kalangan mahasiswa, pedagang, dan akademisi. Setidaknya di sektor tersebut PKS mendapatkan kekuatan yang sangat signifikan. Ketiga, model rekrutmen politik berlapis yang memungkinkan PKS bisa menyaring kader yang akan menduduki jabatan publik dan mempunyai militansi dalam mengembangkan garis ideologi.<sup>1</sup>

Mekanisme ini dinilai sebagai bentuk sikap yang harus dipakai PKS sebagai partai baru dan partai kader. Maka dalam berbagai dinamika politik yang ada PKS menepatkan situasi politik yang memperhitungkan kedudukan politik yang berjalan sehingga PKS sebagai bagian dari politik era reformasi tidak hanya menumpang lewat saja. Oleh karena itu, perlu dilihat bagaimana langkah politik yang diambil PKS dalam melanggengkan kekuasaan, konstelasi politik tingkat nasional, dan konstelasi dalam berbagai keputusan yang tentunya berkaitan dengan perpolitikan daerah.

Eksistensi politik nasional bukan saja sebagai bagian dari melihat kekuatan partai tersebut, namun politik nasional sebagai barometer dalam menentukan kebijakan partai dalam menaungi kepentingan-kepetingan politik di daerah sehingga keputusan politik yang ditimbulkan antara pusat dan daerah akan selalu koheren.

#### **B. PKS dari Pemilu ke Pemilu**

Pada 30 Mei 1999, delapan partai politik berasaskan Islam (PPP, Partai Keadilan, Partai Kebangkitan Ummat, Partai Umat Islam, PPII Masyumi, PNU, PBB, dan PSII 1905 menyepakati penggabungan sisa suara hasil Pemilu 1999.<sup>2</sup> Karena pada Pemilu 1999 PK hanya mendapatkan 1,6% suara hal ini yang menyikapi PK untuk menggabungkan suaranya terhadap delapan partai politik berasaskan Islam. Kemudian PK bersama 15 pimpinan parpol lainnya pada tanggal 8 Juni 2002 menandatangani dokumen bersama untuk menolak UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikutsertaan pemilu selanjutnya yang harus mensyaratkan 2%. Dalam dokumen tersebut juga menuntut dalam penyelenggaran Pemilu 2004 peserta Pemilu 1999 diikutkan kembali walaupun ada beberapa yang sam sekali tidak memperoleh kursi baik di DPR atau DPRD Provinsi ataupun DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini jelas dilakukan oleh PKS untuk mendapatkan eksistensi dalam perpolitikan, selain PKS juga melakukan pembenahan internal sehingga partai yang bernama PK dalam keikutan Pemilu menjadi PKS.

Pada Pemilu 2004 akhirnya PKS memperoleh 7, 34% dari jumlah total mendapatkan kursi 45 dari 550 kursi di DPR.<sup>3</sup> Jurus kekuatan internalah yang memberikan angin segar PKS untuk menempatkan wakilnya di senayan. Usaha ini dilakukan PKS dengan cara mengusung slogan anti-korupsi dan menghindari untuk menampilkan sikap dan perilaku Islamisnya secara terang-terangan. Kemudian PKS

---

<sup>1</sup> M. Faisal Aminudi, *Reorganisasi Partai Keadilan Sejahtera*, Jurnal Studi Pemerintahan Vol 1 No. 1 Agustus 2010, hlm. 139.

<sup>2</sup> Qodir, *HTI dan PKS*, hlm. 145.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 146

ganti mengangkat citra bersih dan peduli dan mempertegas tema-tema “sekuler” tentang pembrantasan korupsi, good governance dan kerja sosial.<sup>4</sup> Hal ini dilakukan karena beberapa partai yang telah mendapatkan kursi ternyata tidak bisa memberikan solusi yang baik bagi perubahan bangsa pasca reformasi, akan tetapi praktek-praktek korupsi tambah meraja lela pasca reformasi tersebut, maka dari momen ini PKS mengambil langkah untuk menawarkan sikap yang berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh partai-partai yang ada di senayan.

Perkembangan PKS dalam pemilu 2009 memperoleh peningkatan kursi dan prosentasi suara yaitu 57 Kursi dengan prosentase 7,9% suara. Proses kenaikan suara ini mengalami kenaikan dibanding partai Islam yang lainnya, hal ini juga dialami beberapa perolehan suara di daerah. Namun disbanding dengan partai-partai nasionalis kenaikan perolehan suara tidak begitu signifikan dibandingkan dengan Demokrat yang mendapat kemenangan Pemilu 2009 dengan prosentase suara lebih 20%. Hal ini menjadikan PKS sebagai partai yang harus begitu elegan dan bisa dipercaya ditengah-tengah masyarakat. Namun dalam perkembangan politiknya PKS menuai kritikan dan bencana yang paling terbaru dan menguncang partai yaitu ketika Lutfi Hasan Iskhak terkena kasus korupsi kasus impor daging. Potret ini jelas-jelas mencoreng tubuh partai yang menamakan partai Dakwah dengan Moto bersih, peduli dan professional, sehingga pada pemilu 2014 PKS mendapatkan imbasnya dari inkonsistensi dari para kadernya tersebut dengan memperoleh suara 6, 79% suara. Penurunan suara yang dialami oleh PKS tersebut menurut Gun Gun Harmanto memang sudah diprediksi. Hal itu bisa dilihat dari sikap-sikap politik PKS Pertama, karena inkonsistensi PKS dalam KIB Jilid II. Beberapa momentum politik menunjukkan PKS '*double strategy*'. Artinya, PKS menikmati kekuasaan tetapi di saat bersamaan juga tidak mau ambil resiko keluar dari kabinet, saat jelas-jelas berbeda secara diametral dengan kebijakan kekuasaan yang didukungnya cintohnya dalam Momentum reshuffle KIB Jilid II dan kenaikan BBM menjadi satu di antara bukti inkonsistensi tersebut. Kedua, partai ini nilai distingtif bahwa PKS sebagai partai bersih dan mempraktikkan high politics ternyata sudah terdegradasi sendiri oleh praktik politik beberapa elitnya."Misalnya kasus, kasus Arifinto atau kasus Misbakun dan konflik antara Anis mata Cs dengan salah satu pendiri PKS sendiri.<sup>5</sup>

### C. Sikap Inklusif PKS sebagai alat pelangengan Politik

Lahirnya Partai Keadilan Sejahtera tidak bisa lepas dari peranan Partai Keadilan. Pernyataan ini bukan tanpa bukti. Bisa kita amati dimana pada pemilu 1999, Partai Keadilan menduduki peringkat ke tujuh diantara 48 partai politik peserta pemilu. Hasil ini tidak mencukupi untuk mencapai ketentuan *electoral threshold*, sehingga tidak bisa mengikut pemilu 2004 kecuali berganti nama dan

---

<sup>4</sup> Muhtadi, *Delema PKS*, hlm. 260.

<sup>5</sup> <http://nasional.inilah.com/read/detail/1870353/pengamat-pks-menurun-akibat-inkonsistensi#sthash.nhtqzNdK.dpuf>, diakses tanggal 10 November 2015

lambang.<sup>6</sup> Karena kegagalan ini Partai Keadilan (PK) bermetamorfosis menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Beberapa pengamat menilai bahwa salah satu faktor kekalahan partai Islam pada pemilu 1999 adalah parpol Islam belum menampilkan inklusivitasnya. Indikasi ini diperkuat oleh kritikan Van Zorge, yang menilai Partai Keadilan sebagai modernis-eksklusif (*modernist-exclusivist*). Kecendrungan terlalu besar kearah eksklusif akan menyulitkan partai ini untuk maju, dan bahayanya bagi, PK akan potensial untuk ‘layak dimusuhi’ oleh kawan-kawan penganut Islam Kultural. Dan celakanya, justru eksklusifisme adalah lawan paling potensial bagi cita-cita membangun watak bangsa. Watak bangsa tidak mungkin dibangun paralel dengan eksklusifisme. Dibalik kritikan itu Van Zorge juga memberikan penilaiin “inklusif”. PK yang diakuinya sebagai partai *reformist* dan *unique* itu, disebut-sebut sebagai partai yang gampang berkompromi dan bekerja sama ketika berhadapan dengan realitas politik. “*Partai Keadilan has demonstrated a willingness in the past to compromise and work within the confines of political realities,*” ujar Van Zorge.<sup>7</sup>

Untuk itu, PK kedepannya memiliki prospek untuk menjadi partai inklusif dan ini terlihat sejak transformasi Partai keadilan menjadi Partai Keadilan Sejahtera.

Perlunya sikap inklusif ini juga dibenarkan oleh R William Liddle, menurutnya Partai-partai inklusif dianggap lebih otonom atau mandiri, sebab pengurusnya tidak dikuasai oleh satu kekuatan sosial, seperti organisasi agama atau kelompok etnis tertentu. Partai-partai semacam itu juga lebih luwes dan fleksibel, sebab pengurusnya tidak dihalangi oleh komitmen-komitmen sempit dalam merangkul berbagai kekuatan sosial baru. Lagi pula, selama ada pemilu yang “luber”, partai-partai inklusif dirangsang terus untuk menambah jumlah pengikutnya dengan cara memasukan golongan baru, sehingga menjadi lebih inklusif lagi.<sup>8</sup>

Sikap inklusif ini dijawab oleh PK(S) dengan melakukan rekrutmen anggota dari orang-orang yang berlatar belakang non-tarbiyah. Bahkan pada pemilu 2004, partai PKS menjaring lebih dari 30 calon legislatif non muslim. Disamping itu, PK juga merekrut orang-orang non muslim sebagai anggotanya. Hal ini terlihat dari di sahkanya DPD Partai Keadilan Piniai pada tanggal 5 Juni 2002, yang mayoritas pengurusnya beragam kristen.<sup>9</sup> Para pimpinan PK(S) juga memberikan kesempatan kepada tokoh agama hindu untuk menjadi anggota legislatif. Kesempatan mengemuka pada mukernas di Bali pada 1-3 February 2008, ketika itu Fahri

---

<sup>6</sup> Bambang Setiawan dan Bestian Nainggolan, ed., *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi Dan Proqram 2004-2009* (Jakarta: Kompas, 2004), hlm. 230.

<sup>7</sup> Husain Al-Banjari, “SA, ET, dan Prospek Partai Keadilan,” dalam Hamid Basyaib dan Hamid Abidin, ed., *Mengapa Partai Islam Kalah?* (Jakarta: Alvabet, 1999), hlm. 276.

<sup>8</sup> R William Liddle, *Partisipasi Dan Partai Politik*. Penerjemah , (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992), hlm. 14.

<sup>9</sup> Cahyadi Takariawan, *Bukan Di Negeri Dongeng Kisah Nyata Para Pejuang Keadilan*, (Jakarta: Syaamil, 2003), hlm. 124-126

Hamzah menawarkan Ida Pedanda Sebali Tianyar seorang tokoh Hindu Bali untuk menjadi caleg dari partainya.<sup>10</sup>

Dalam perspektif seperti ini, perlu kita telaah lebih lanjut dimana PKS sebagai partai baru yang berbeda dari partai politik kebanyakan, dan terlebih lagi kita ketahui bersama bahwa PKS berasal dari komunitas muslim baru di Indonesia dalam perkembangan kepartaian saat ini ada kesan ideologi yang diusungnya semakin bergerak ke tengah. PKS memilih untuk menjadi partai politik yang terbuka atau bisa dimaknai bahwa Partai Keadilan Sejahtera saat ini memilih untuk menjadi partai yang plural, menerima perbedaan dan keberagaman. Tentunya ini bersebrangan dengan visi umum dan visi khusus Partai Keadilan Sejahtera yang secara resmi menyatakan akan mengarahkan partai dakwah itu untuk memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; akan mengarahkannya menjadi kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang; akan mengarahkannya sebagai kekuatan yang menggalang dan memelopori kerja sama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang *rahmatan lil-Alamin*; akan mengarahkannya sebagai akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.<sup>11</sup>

Tentang pendukung terhadap RUU keistimewaan Yogyakarta. PKS melihat bahwa Keistimewaan Daerah Yogyakarta PKS memandang bahwa keistimewaan Meliputi tiga hal, diantaranya. *Pertama*, keistimewaan dalam bidang Politik dan Pemerintahan. *Kedua*, keistimewaan dalam bidang Pertanahan. *Ketiga*, keistimewaan dalam bidang Sosial dan Budaya. Dalam menyikapi hal ini posisi PKS yang diutarakan oleh Arif Budiono selaku wakil ketua fraksi DPRD Provinsi DIY Priode 2009-2014, menjelaskan bahwa Substansi dari keistimewaan Yogyakarta terletak pada keistimewaan Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, selain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Meliputi *pertama*, pengakuan secara legal posisi Kesultanan dan Pura Pakualaman sebagai warisan budaya bangsa (*national heritage*). Dalam posisi sebagai warisan budaya bangsa. Kesultanan dan Pakualaman mempunyai:<sup>12</sup>

- a. Fungsi sebagai pengawal, pelestari, dan pembaharu aset dan nilai-nilai budaya asli Indonesia sebagai warisan budaya dunia.
- b. Hak sebagai konsekwensi dari pengakuan atas keduanya sebagai warisan budaya bangsa yang memiliki fungsi, tugas, dan kewajiban tertentu. Hak ini diwujudkan melalui hak keuangan yang diberikan pemerintah nasional dan pemerintah provinsi melalui APBN dan APBD.

---

<sup>10</sup><http://garammanis.wordpress.com/2010/12/21/partisipasi-politik-non-muslim-dalam-partai-politik-islam-analisa-terhadap-pk-sejahtera/>

<sup>11</sup>Dijelaskan dalam buku Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera

<sup>12</sup>Wawancara dengan Arif Budiono, wakil ketua Fraksi PKS, DPRD DIY, 24 April 2011.

- c. Tugas dan kewajiban melakukan konsolidasi (inventarisasi, klasifikasi, dokumentasi) aset dan nilai-nilai warisan budaya serta memelihara semua aset dan nilai-nilai warisan budaya sehingga tetap relevan dengan perubahan jaman.

*Kedua*, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki bentuk dan susunan pemerintahan yang berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia. Hal ini didasarkan pada dua pertimbangan pokok. Pertama, keistimewaan yang dimiliki Yogyakarta membutuhkan adanya kelembagaan yang dapat mengelolanya dengan sebaik-baiknya agar dapat mencapai tujuan keistimewaan itu sendiri. Kedua, Yogyakarta, sebagaimana diindikasikan pada bagian sebelumnya, telah memiliki kelembagaan pemerintahan yang efektif untuk jangka waktu yang sangat lama. Karenanya, substansi keistimewaan dalam bidang ini akan memberikan kesempatan pada pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk merevitalisasi kelembagaan yang dimiliki bagi kepentingan masyarakat luas.<sup>13</sup>

*Ketiga*, dalam ranah politik, kekhususan Yogyakarta terletak pada sumber dan proses rekrutmen Gubernur. Pengalaman pengelolaan Yogyakarta sejak kemerdekaan dan sekaligus pengaturan melalui UU No. 3 Tahun 1950 menunjukan sumber rekrutmen Gubernur DIY dibatasi hanya dari lingkungan keluarga dan kerabat keraton. Sementara sumber rekrutmen bagi Wakil Gubernur dibatasi pada lingkungan keluarga dan kerabat Pakualaman. Hanya saja, bagi kepentingan ke depan terdapat tiga kemungkinan skenario. Skenario pertama, sumber rekrutmen bersifat tertutup yang dibatasi pada kerabat dan keluarga Keraton dan Pakualaman. Skenario kedua sumber rekrutmen didasarkan pada prinsip-prinsip monarkhi konstitusional dimana kerabat dan keluarga Keraton dan Pakualaman dikecualikan. Skenario ketiga adalah sumber rekrutmen bersifat terbuka dengan prinsip-prinsip kewarga-geraaan sebagai pembatasnya. Setiap warga negara, termasuk dari lingkungan keluarga dan kerabat Keraton dan Pakualaman dijamin hak politiknya untuk menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.<sup>14</sup>

Dalam bidang pertanahan Pemberian kewenangan dalam bidang pertanahan dan penataan ruang didasarkan pada pertimbangan: *Pertama*, tanah Kesultanan dan Pakualaman memiliki fungsi perlindungan sosial bagi kelompok-kelompok marginal. Fungsi yang oleh Nurhasan Ismail dirumuskan sebagai pertimbangan filosofis yang terkait dengan nilai keadilan dan kemanfaatan. Keadilan terkait dengan sikap dan kebijakan kedua kraton yang selalu ingin memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua kelompok masyarakat yang ada dengan tidak membedakan agama atau etnis dalam kepemilikan tanah serta sikap memberikan perlindungan kepada kelompok yang lemah. Kebijakan-kebijakan Keraton yang terkait dengan pemanfaatan tanah juga ditunjukkan oleh

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

konsistensi kedua penguasa dalam memperkuat hak penguasaan tanah oleh rakyat dengan memberikan hak yang lebih kuat dari sekadar hak menggarap tanah.<sup>15</sup>

*Kedua*, sebagaimana ditegaskan Maria SW Sumardjono, yaitu secara yuridis formal dinyatakan sudah hapus dan menjadi tanah nega, namun fakta menunjukkan bahwa tanah Kraton masih eksis dan diakui oleh masyarakat maupun birokrasi. *Ketiga*, ruang bagi Yogyakarta memiliki fungsi kebudayaan. Pengaturan ruang tidak semata-mata menyangkut dimensi fisik, tapi sekaligus menggambarkan filosofi keseimbangan (harmoni) antara makro kosmos dan mikro kosmos (*jagad gedhe - jagad cilik*) yang menjadi fondasi dari kebudayaan Yogyakarta. Setiap perubahan dalam penataan ruang sebagai sebuah sistem dan proses perencanaan tata-ruang, serta pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 26 Tahun 2007 akan berimplikasi pada perubahan budaya. Karenanya, penataan ruang harus juga mendapatkan direksi dan sekaligus dapat dikontrol oleh *Parardhya*.

Sedangkan dalam memaknai budaya menurut PKS ada tiga elemen pokok yang relevan dalam pemaknaan keistimewaan Yogyakarta dari segi budaya. Pertama, Keraton sebagai institusi adat yang melukiskan karya adi luhung (court culture). Kedua, unsur transformasi nilai-nilai modernitas melalui jalur pendidikan; dan ketiga, fungsi Sultan sebagai mediator kosmologis antara misi kerajaan Islam dengan realitas masyarakat yang pluralis.<sup>16</sup>

Dari sikap politik tersebut bisa dilihat dari sikap politik Fraksi yang menanggapi Menanggapi surat pimpinan DPRD nomor : 160/1601, hal : Pernyataan Sikap Fraksi-fraksi DPRD Provinsi DIY terhadap suksesi jabatan Gubernur DIY, tertanggal 2 Desember 2010, maka Fraksi PKS menyampaikan beberapa pertimbangan sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 1) Fraksi PKS sangat menghargai dan memahami jejak sejarah amat dalam yang ditorehkan oleh Sultan Hamengku Buwana IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII dengan menggabungkan 2 (dua) Kerajaan yang beliau berdua pimpin dengan bayi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) melalui Maklumat 5 September 1945 yang fenomenal tersebut, sehingga dengan bergabungnya dua kerajaan ini, posisi tawar dan politik NKRI menjadi kuat dan diperhitungkan oleh dunia internasional. Hal inipun telah diakui pula oleh Bapak pendiri bangsa ini dengan mengakuinya sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta yang setingkat provinsi, dipimpin oleh Dwitunggal Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
- 2) Fraksi PKS sangat memahami ketentuan dalam konstitusi NKRI pasal 18B dalam memandang Keistimewaan DIY yang diatur tersendiri dan diakui serta dihormati sebagai salah satu satuan pemerintahan daerah yang merupakan

---

<sup>15</sup> Lihat pula, Ni'matul Huda, "Pengaturan Tanah-Tanah Kraton Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan UUPA No. 5 Tahun 1960", Makalah, disampaikan dalam Lokakarya RUU Keistimewaan Yogyakarta, diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah, Yogyakarta, 24 April 2007.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Pernyataan sikap Fraksi PKS DPRD Provinsi DIY, Sidang Paripurna, 13 Desember 2010.

pengecualian dari berbagai ketentuan umum yang tercantum pasal 18 UUD 1945 ayat 4.

- 3) Fraksi PKS sangat merasakan dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang amat menghargai, menghormati dan mencintai para pemimpin kultural mereka, sehingga mereka meminta agar para pemimpin tersebut tetap memimpin mereka, baik sebagai pemimpin kultural di Keraton Kasultanan dan Pura Pakualaman sekaligus pemimpin di Pemerintahan. Mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan harapan sebagian besar masyarakat DIY hanya akan menyebabkan terjadinya kondisi disharmoni yang tidak menguntungkan bagi berjalannya pemerintahan di DIY dan memperburuk hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, yang jelas-jelas merugikan masyarakat DIY secara keseluruhan.
- 4) Sesuai dengan instruksi Ketua DPW PKS DIY tertanggal 12 des 2010 no: 001/AL/DPW-PKS/I/1432 yang memerintahkan Fraksi PKS untuk memperjuangkan penetapan Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Paduka Pakualam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RUU Keistimewaan DIY.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka Fraksi PKS menyatakan sikap terhadap Pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :<sup>18</sup>

- a. Fraksi PKS mengusulkan agar pengisian jabatan gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dengan menetapkan Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Paduka Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal-hal lebih teknis mengenai isi Rancangan Undang-undang Keistimewaan DIY, akan kami sampaikan kepada DPR RI melalui Anggota Fraksi PKS di DPR RI.
- b. Kepada seluruh masyarakat Yogyakarta, Fraksi PKS mengajak marilah kita perjuangkan keistimewaan Yogyakarta dengan cara yang istimewa yakni perjuangan yang menjunjung tinggi nilai2 luhur dan bermartabat, sebagaimana karakter rakyat Yogyakarta yang menjunjung tinggi nilai2 luhur dan akhlaq mulia. Jangan sampai ada darah yang tercecce, jangan ada perilaku anarkhis. Kita tunjukkan kepada Indonesia, kita tunjukkan kepada dunia bahwa Yogyakarta menjunjung tinggi nilai nilai demokrasi, mampu menghargai dan menghormati perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak. Mari kita torehkan sejarah perjuangan keistimewaan Yogyakarta dengan tinta kejuangan yang dapat dibanggakan oleh anak cucu kita.

Pilkada 2010 di Sleman PKS melakukan Koalisi Partai Politik ini dilakukan kepada Partai pengusung Hafidh dan Sri Muslihatun, yang terdiri dari Partai Demokrat, PPP, Kolaisi pemenangan Gusti kajeng Ratu Hemas pada waktu pemilu, dengan pusat pertemuan tersebut dilakukan di Hafidz Center. Kesepakatan ini dilakukan dengan menghandalkan kerja mesin partai masing-masing dengan tujuan dari dukungan koalisi ini, maka Hafidh Sri Muslimatun akan menang.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*



Kesepakatan itu kemudian dijalankan sesuai dengan roda mesin politik partai, yang basis pemilihnya dilakukan dengan pemetaan suara pada waktu pemilu 2009, dari roda politik yang dijalankan PKS sendiri mampu mempertahankan suara pada pemilu 2009, hal ini juga diperkuat oleh pernyataan ketua DPD PKS sendiri dengan mengklaim bahwa suara Hafidh dan Sri muslimatun tersebut adalah suara dari PKS, hal itu dapat dilihat dari perolehan suara pada waktu 2009 yaitu di daerah Gamping dan Mlati adalah sebagai penyumbang suara terbanyak di Sleman dapat dipertahankan pada pemilukada 2010 ini untuk menyumbangkan suara terhadap pasangan Hafidh dan Sri Muslimatun. Namun menurutnya Bagi partai-patai pendukung lainnya roda politiknya tidak maksimal, apalagi suara Demokrat yang tidak Signifikan hal ini bisa juga dilihat bahwa kerja mesin politik yang dilakukan tidak seperti pada waktu 2009,”karena pada waktu 2009 politik uang yang dijalankan sangat sukses bahkan pada waktu itu sesama kader bisa saling berhadap-hadapan.<sup>19</sup> Sehingga dari pemilihan Kepala daerah Kabupaten Sleman tersebut suara calon yang diusung PKS yaitu Hafidz dan Sri Muslihatun mendapatkan 13, 69%.

Kinerja politik seperti ini dinilai kurang efektif karena kalau dilihat dari calon yang diusung tersebut tidak memberikan keuntungan kepada partai manapun. Karena jika dilihat dari latar belakang partai yang mengusung terhadap calon tidak memiliki keterikatan, sehingga dalam menjalankan roda politik partai setengah-setengah, walaupun Hafidh mendapatkan restu dari Nahdatul Ulama’ tetapi adanya calon dari warga NU yang juga tokoh partai PKB memecah suara warga NU sendiri. Apalagi basis masa PPP di Sleman tidak menunjukkan repersetasi dari warga NU.

Pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2008 PKS ikut serta dalam percaturan politik yang mengusung Syamsul Arifin sebagai Gubernur dan Gatot Pujo Nugroho sebagai calon wakil Gubernur. Dalam proses pencalonan tersebut calon yang menjadi kader secara langsung dengan PKS dalah Gatot, sedangkan Syamsul Arifin bukanlah kader dari PKS melainkan dari Golkar Namun ketika itu Syamsul Arifin tidak langsung dicalonkan oleh Golkar tetapi didukung oleh PPP, PBB, Partai Patriot. Dalam proses pencalonan dari kedua pasangan tersebut tidaklah mudah, harus melalui proses yang sangat panjang dengan melakukan beberapa pertimbangan dalam menuntukan calon yang akan diusung, pertimbangan tersebut yaitu:

1. Mendukung PDI-P (Bambang Tritamtomo) terkendala tentang visi PKS yang sejalan dengan Islam.
2. Mendukung Golkar (Ali Umri) beresiko sebab beberapa dari kadernya terlibat dalam bursa pencalonan Pilgub.
3. Mendukung Demokrat (Abdul Wahab) tidak dimungkinkan, karena tidak sevisi dan ditubuh PBR terjadi konflik internal.
4. Akhirnya mendukung Syamsul yang didukung oleh PPP, PBB, Partai Patriot dan yang lainnya, serta Syamsul dinilai yang paling cocok untuk didukung

karena kedepannya Syamsul menjadi cikal bakal pasangan yang diusung oleh partai Islam.<sup>20</sup>

Dalam Pilkada Papua Barat PKS berkoalisi dengan PDS. (Partai Damai Sejahtera). Sikap koalisi dengan beberapa partai yang tidak sejalan dengan visi misi partai dianggap sebagai bagian pragmatise partai, hal ini terjadi seperti dengan partai-partai lainnya. Namun bagi PKS, pilihan koalisi dengan partai-partai tersebut diletakan sebagai aliansi taktis. Rujukan yang diambil dalam membentuk koalisi tersebut, bersumber dari praktik politik yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu beliau pernah melakukan aliansi lain dalam urusan kenegaraan. Syarat koalisi tersebut tidak meninggalkan prinsip aqidah dan menjamin kepentingan Islam.<sup>21</sup>

Sikap dan Prinsip tersebut jelas berlainan dengan pendapat tokoh-tokoh pemikir politik Islam seperti Dr. Hisham Yahya Altalib<sup>22</sup>, mengatakan ada beberapa ciri penting yang menggambarkan kepemimpinan Islam yaitu :

- a). Setia kepada Allah. Pemimpin dan orang yang dipimpin terikat dengan kesetiaan kepada Allah.
- b). Tujuan Islam secara menyeluruh. Pemimpin melihat tujuan organisasi bukan saja berdasarkan kepentingan kelompok, tetapi juga dalam ruang lingkup kepentingan Islam yang lebih luas;
- c). Berpegang pada syariat dan akhlak Islam. Pemimpin terikat dengan peraturan Islam, dan boleh menjadi pemimpin selama ia berpegang teguh pada perintah syariah. Dalam mengendalikan urusannya ia harus patuh kepada adab-adab Islam, khususnya ketika berurusan dengan golongan oposisi atau orang-orang yang tak sepaham.

Pengemban amanat. Pemimpin menerima kekuasaan sebagai amanah dari Allah Swt., yang disertai oleh tanggung jawab yang besar. Al-Quran memerintahkan pemimpin melaksanakan tugasnya untuk Allah dan menunjukkan sikap yang baik kepada pengikut atau bawahannya.

Sedangkan menurut Ibn Khaldun tentang seorang pemimpin sendiri adalah:

- a). Harus berasal dari kalangan sendiri.
- b). Mempunyai kemampuan menguasai warganya.
- c). Mempunyai kekuatan, kewibawaan serta kewenangan. Dan inilah yang disebut al-Mulk..<sup>23</sup>

Di samping itu, persyaratan seorang pemimpin adalah:

- a). Berilmu pengetahuan. Yaitu perpengetahuan disertai kesanggupan untuk mengambil keputusan-keputusan sesuai syariat.
- b). Bersifat adil. Yaitu jujur, berpegang pada keadilan dan pada umumnya mempunyai sifat-sifat moral yang baik sehingga perkataannya dapat dipegang dan dapat dipercaya.

---

<sup>20</sup> Fisip USU, *Politik Pilkada di Sumut* (Medan: Fisip USU Press, 2008), hlm.123.

<sup>21</sup> DPP Partai Keadilan, *Politik Dakwah Partai Keadilan* (Jakarta: DPP PK, 2000), hlm. 39.

<sup>22</sup> Hisham Yahya Altalib, *Training Guide For Islamic Workers* (Virginia: The International of Islamic Thought, 1991), hlm 55

<sup>23</sup> Frederich, *A History of Philosophy* (London: Press Limited, 1953), hlm. 123.

- c). Mempunyai kesanggupan dalam menjalankan tugas yaitu mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hukum-hukum yang ditetapkan oleh undang-undang, mampu memobilisasi rakyat, mampu mengendalikan politik kenegaraannya, mampu berdiplomasi dan lain sebagainya.

#### **D. Efek Politik PKS**

Pasca tumbangnya orde Baru gairah perpolitikan di Indonesia mulai berkembang lagi, partai politik yang dulu tidak berdaya ketika berhadapan dengan penguasa mulai masa ini memperlihatkan kekuatannya sebagai pengontrol jalannya kekuasaan. Seiring berkembangnya dinamika politik keberadaan partai politik diharapkan sebagai alat penopang suara rakyat, karena harapan demokrasi partai-partai sebagai alat aspirasi, namun hal ini terbalik dengan cita-cita awal dari Reformasi partai-partai yang ada hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompoknya sendiri. Hal ini juga terlihat terhadap perkembangan partai-partai Islam pasca Reformasi. Identitas sebagai partai yang awalnya mengaku sebagai penopang suara masyarakat Muslim senyatanya dalam dinamika politik, para kadernya malahan membelot dari cita-cita awal partai tersebut didirikan. Para kader asyik mementingkan kepentingan individu dari jabatan yang mereka dapatkan.

Peristiwa tersebut juga menimpa dengan partai yang mengatasnamakan sebagai partai kader yaitu PKS. Awal kemunculan partai yang berasal dari roh harkah Tarbiyah tersebut kemudian mula-mulanya memberikan harapan baru terhadap perkembangan politik di Indonesia. Namun berbanding terbalik ketika partai ini mulai mendapatkan tempat dihati rakyat. Partai yang awalnya mengusung sebagai partai dakwah dan kader serta mengklaim mempunyai kerapatan barisan kader sama sekali tidak menunjukkan perjuangan yang signifikan terhadap rakyat. Terlihat sekali dalam beberapa even Pilkada para calon yang diajukan PKS baik di tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota para kader PKS tidak menunjukkan konsistensinya dalam perjuangan partai, terbukti dalam kasus Gubernur Bengkulu, yang terpilih melalui tiket koalisi yang dipimpin PKS, setelah menjabat dan mendapatkan posisi kekuasaan kemudian menyeberang ke Partai Demokrat. Masih ada lagi kasus Bupati Cianjur yang juga terpilih melalui PKS setelah terpilih menyeberang ke partai lain juga.<sup>24</sup>

Dua kasus tersebut menunjukkan bahwa proses kaderisasi PKS tidak berjalan dengan benar, terbukti dari kasus tersebut seluruh kandidat yang dicalonkan sebagai kepala daerah berasal calon dari luar PKS, yang awal pencalonan menjanjikan loyalitas terhadap partai, namun setelah terpilih berbalik arah keluar dari PKS. Ini menjadi dilema dalam pertumbuhan partai politik karena proses pengkaderan partai politik tidak berjalan sesuai dengan harapan. Lebih-lebih bagi PKS yang awalnya mendeklarasikan sebagai partai kader dan massa tetapi masih saja hitung-hitungan politik dalam pencalonan kepala daerah.

---

<sup>24</sup> Zealous Democrats: *Islamism and Democracy in Egypt, Indonesia and Turkey*, Terj. Syamsul Rijal, *PKS dan Kembaranya: Bergiat jadi Demokrat di Indonesia, Mesir dan Turki* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm 57.

Pengaruh pragmatisme ini dalam politik tentu tidak diinginkan oleh rakyat karena sistem demokrasi ataupun totaliter pada prinsipnya partai politik mempunyai fungsi yang signifikan dalam perkembangan politik sehingga perjuangan politik partai dalam sistem demokrasi benar-benar akan terwujud, maka fungsi-fungsi signifikan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

a). Sosialisasi politik

Dalam ilmu politik sosialisasi politik dapat diartikan sebagai suatu proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah masyarakat dapat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang sedang berlangsung.

b). Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik yaitu seleksi dan pemilihan atau pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.

c). Partisipasi politik

Partai politik berfungsi dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud antara lain, mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum.

d). Pemandu Kepentingan

Dalam masyarakat terdapat berbagai kepentingan yang berbeda-beda bahkan saling bertentangan satu sama lain. Untuk menampung berbagai kepentingan tersebut maka partai politik dibentuk. Pemandu kepentingan dimaksudkan sebagai kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda dan bertentangan satu sama lain menjadi berbagai alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

e). Pengendalian konflik

Partai politik berfungsi untuk melakukan pengendalian konflik mulai dari perbedaan pendapat sampai pada pertikaian fisik antar individu atau kelompok melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.

f). Kontrol politik

Partai politik melakukan kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Budiharjo, *Dasar-dasar*, 405-409.

Melihat fungsi signifikan partai politik tersebut, maka langkah PKS yang mengklaim sebagai partai masa dan kader, dapat diketahui dari sistem kaderisasi PKS. Tentunya sikap-sikap kaderisasi yang konsisten dimulai dari bawah yaitu DPD, seperti halnya yang terjadi di DPD PKS Sleman. Tingkat Daerah bagi PKS adalah tempat sebagai penggemblengan kader serta mensolitkan suara akar rumput partai sehingga peluang-peluang politik yang ada di akar rumput partai bisa dimanfaatkan sedemikian baik, lebih-lebih para pendiri dan pengurus DPD PKS Sleman kebanyakan bukan dari penduduk asli.<sup>26</sup> Keberadaan para kader PKS yang demikian ini dikarenakan para kader sudah lama belajar dan kuliah di Yogyakarta kemudian menetap di daerah sekitar Yogyakarta salah satunya di Sleman, sehingga cara dan pendekatan yang dilakukan dengan masyarakat dapat dengan pendekatan-pendekatan kultur.

Jika PKS tidak memanfaatkan situasi atau turut serta dalam perkembangan politik ditakutkan apabila terjadi transaksi politik di masyarakat Sleman PKS tidak bisa memanfaatkan momentum tersebut. Sikap keterbukaan ini dalam dunia politik di Indonesia dianggap lumrah, karena politik dalam perkembangannya dijadikan sebagai siasat atau cara untuk mendapatkan kekuasaan dan suara yang banyak. Kalau mau ditelusuri kata politik pada prinsipnya diambil dari bahasa arab "*siyasah*", yang bisa diartikan menjadi siasat atau dalam bahasa inggris berarti "*Politics*"<sup>27</sup>. Maka tidak heran kalau politik itu memang harus cerdas, dan bijaksana dalam pembicaraan sehari-hari yang kemudian dijadikan cara untuk mencapai tujuan. Untuk itu sikap-sikap politik yang individu PKS yang tempo dulu tidak akan bisa merespon peta politik dan fenomena perkembangan sosial yang kemudian akan berdampak akan merubah pola dan pandangan dari politik PKS sebagai gerakan tarbiyah menjadi gerakan politik, dan itu semua dapat dilihat dari perubahan-perubahan di internal partai dan dapat digambarkan dalam kebijakan-kebijakan politik partai.

Maka kebijakan tersebut akan memberikan efek terhadap Pergeseran Ideologi PKS karena budaya politik Indonesia dalam menyikapi perkembangan dinamika politik secara langsung telah mempengaruhi perubahan ideologi partai, karena salah satu pengaruh yang belum bisa dihilangkan adalah kebudayaan itu sendiri, maka sebesar apapun ideologi partai tersebut keluar dari nasionalis atau pancasila tidak akan tumbuh dengan pesat. Karena budaya sudah sangat erat kaitannya dengan sosiologi yang membicarakan tentang perubahan masyarakat, selain itu dalam pembicaraan politik budaya dianggap penting karena merupakan faktor yang mengkaji pola perilaku seseorang ataupun kelompok orang (suku) yang orientasinya berkisar tentang kehidupan bernegara dan yang

---

<sup>26</sup> Pengamatan terhadap aktivitas-aktivitas Kader PKS ketika berbaur dengan masyarakat dalam pengajian atau dalam kegiatan sosial keagamaan. Hal ini diperkuat dari wawancara Budi Kismiayata, Kader Kepanduan DPD PKS Sleman, di masjid al-Falah Gejawan Wetan pada tanggal 25 Maret 2013.

<sup>27</sup> Inu Kencana Syafie dan Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, Cet ke- V (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 6

berkaitannya dengan hajat orang banyak.<sup>28</sup> Disini jati diri partai dipertaruhkan sebagai partai yang konsisten dengan tujuan awal berdirinya atau mengikuti perkembangan sosial masyarakat.

Sistem budaya yang masih kental nampaknya memberikan kemerosotan terhadap ideologi partai politik. Keberadaan partai-partai tersebut selama ini dinilai tidak bisa mengilhami apa yang harus dibuat setelah masuk dalam sistem pemerintahan baik itu di eksekutif maupun di legislative malahan tidak menunjukkan jati diri partai. Badai kemerosotan ideologi tersebut nampaknya dialami PKS, hal ini dapat dilihat pada keikutan pemilu 1999 dan 2004 terasa ada perbedaan. Pada awal keikutan Pemilu 1999 PKS masih kental memakai unsur-unsur Islam masuk dalam kebijakan partai dan seolah-olah PKS terdapat pernyataan bahwa PKS membela Islamisasi negara atau sistem hukum sehingga *image* sebagai afiliasi politik dari Ikhwanul Muslimin tidak terelakan. Untuk itu dalam menghadapi Pemilu 2004 dan Seiring perkembangan politik yang tidak menentu nilai-nilai Islam tersebut tersebut hanya sebagai ideologi yang tidak ada gunanya, bahkan PKS dalam kampanyenya menggunakan slogan-slogan dengan tema-tema universal seperti kesejahteraan sosial, pemerintahan yang bersih serta pemberantasan korupsi, serta menuntaskan kemiskinan dan keterbelakangan.<sup>29</sup> Itu semua semata-mata untuk memperlihatkan fungsi PKS sebagai politik yang moderat. Dalam era demokrasi sikap tersebut dianggap lumrah, karena sistem yang dibangun di Indonesia ini lebih mengutamakan perolehan suara bukan bagaimana partai politik tersebut beradu gagasan ideologi politik.

Jika ditelusuri antara realita politik dan ideologi PKS memang sangat kurang sinkron dengan perjuangan selama ini karena sangat jelas dalam dokumen doktrinal partai, PKS memandang Islamisasi negara secara komprehensif dan penerapan syariah sebagai tujuan jangka panjang. Seperti dalam buku PKS tentang Platform dan falsafah perjuangan disebutkan:

“Bagi Muslim mempunyai negara yang bebas menerapkan nilai-nilai Tuhan dan syariah-Nya merupakan kewajiban... Dalam Islam tidak dikenal pemisahan agama dan politik. Kesatuan agama dan negara adalah prinsip utama dalam Islam serta dalam sejarahnya yang panjang... Dalam Islam, negara bisa disebut Islam ketika syariah sebagai ketetapan langsung dari Tuhan, menduduki posisi tertinggi dalam mengatur semua urusan...”<sup>30</sup>

Sikap dari platform PKS tersebut menunjukkan bahwa awal berdirinya partai ini adalah merubah pandangan masyarakat menjadi hidup yang Islami, namun dengan perkembangan politik semakin sulit untuk ditebak dan dinamis, maka untuk PKS mempertahankan eksistensi politik PKS karena takut akan ditinggalkan oleh para simpatisan ataupun para kader, maka PKS secara tegas

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 88.

<sup>29</sup> *Democrats: Islamism*, Terj. Rijal, *PKS dan Kembaranya*, hlm. 62.

<sup>30</sup> Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Falsafah dasar perjuangan : Jalan Keadilan menuju Kesejahteraan*, 2007, hlm. 92 dan 95. Lihat juga di *Democrats Islamisme*. hlm. 62-63.

dalam RAKORNAS di Bali menyatakan bahwa PKS adalah partai terbuka dan PKS membuka diri untuk kalangan umum baik non simpatisan atau non Islam untuk bergabung di PKS.

Keterbukaan tersebut senyatanya sudah terjadi sejak tahun 2004 walaupun belum secara jelas dipublikasikan. Hal itu terbukti dengan kebijakan-kebijakan politik yang diambil seperti wadah perjuangan partai dari awalnya adalah gerakan kalangan Tarbiyah, kemudian merubah sistem pelebaran sayap bukan hanya untuk kalangan tarbiyah saja namun untuk kalangan umum. Bahkan dalam realita politikpun telah terjadi kasus koalisi dengan jarak ideologi yang berjauhan terjadi dalam Pilkada Kota Yogyakarta, PDIP sebagai partai nasionalis menjalin koalisi dengan PPP dan PKS yang menjadikan islam sebagai ideologi formal partai. Inilah yang menjadikan degradasi tentang pemahaman Ideologi PKS itu sendiri sehingga perlu dipertanyakan kembali tentang pemaknaan Ideologi terhadap para kader.

Mak jika mau ditengok kembali dalam penentuan arah kebijakan partai tentunya Majelis Syura' karena sumber dari segala sumber kebijakan, ideologi dan mekanisme partai terletak di Majelis Syura'. Sistem mekanisme seperti ini sudah menjadi sumber hukum partai sehingga kader yang ada di bawah mau tidak mau harus mengikuti intruksi dari atas. Selain itu sistem yang demikian ini menimbulkan kesewenang-wenangan dalam pengambilan kebijakan dalam aplikasi politik maka tidak heran jika para mantan pendiri PKS untuk campur tangan meluruskan kembali apa yang menjadi cita-cita awal partai ini didirikan, karena para pendiri PKS selama ini melihat bentuk pendustaan dari garis cita-cita hanya dimiliki oleh para elit partai. Hal tersebut seperti dikatakan Mashadi.

Fakta ini sangat menyedihkan jika partai yang awalnya dibangun dengan kekuatan ideologi Islam yang mempunyai sistem dakwah, namun konsistensi pembinaan terhadap kader Islam mulai luntur. Peristiwa tersebut tidak akan terjadi apabila PKS mampu memperlihatkan pola-pola yang konsisten dalam aplikasi ideologi di masyarakat. Di lain hal sistem politik yang tidak konsisten bertentangan dengan ajaran agama Islam dalam keikhlasan beramal, karena pada prinsipnya tujuan awal PKS bukan untuk golongan tertentu sehingga amplikasi amalan untuk menyadarkan masyarakat akan terwujud.

#### **E. Daftar Pustaka**

- M. Faisal Aminudi, 2010, *Reorganisasi Partai Keadilan Sejahtera*, Jurnal Studi Pemerintahan Vol 1 No. 1..
- Bambang Setiawan dan Bestian Nainggolan, ed., 2004, *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi Dan Program 2004-2009*, Kompas, Jakarta.
- Husain Al-Banjari, "SA, ET, dan Prospek Partai Keadilan," dalam Hamid Basyaib dan Hamid Abidin, ed., 1999, *Mengapa Partai Islam Kalah?* Alvabet, Jakarta.
- R William Liddle, 1992, *Partisipasi Dan Partai Politik*. Penerjemah Tim Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Cahyadi Takariawan, 2003, *Bukan Di Negeri Dongeng Kisah Nyata Para Pejuang Keadilan*, Syaamil, Jakarta.

- Ni'matul Huda, 2007, "*Pengaturan Tanah-Tanah Kraton Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan UUPA No. 5 Tahun 1960*", Makalah, disampaikan dalam Lokakarya RUU Keistimewaan Yogyakarta, diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah, Yogyakarta.
- Fisip USU, 2008, *Politik Pilkada di Sumut*, Fisip USU Press, Medan.
- DPP Partai Keadilan, 2000, *Politik Dakwah Partai Keadilan*, DPP PK, Jakarta.
- Hisham Yahya Altalib, 1991, *Training Guide For Islamic Workers*, The International of Islamic Thought, Virginia.
- Frederich, 1953, *A History of Philosophy*, Press Limited, London.
- Zealous Democrats: *Islamism and Democracy in Egypt, Indonesia and Turkey*, Terj. Syamsul Rijal, 2012, *PKS dan Kembaranya: Bergiat jadi Demokrat di Indonesia, Mesir dan Turki* Komunitas Bambu, Jakarta.
- Inu Kencana Syafii dan Azhari, 2009, *Sistem Politik Indonesia*, Cet ke- V Refika Aditama, Bandung.
- Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Bandung: *Falsafah dasar perjuangan : Jalan Keadilan menuju Kesejahteraan*, Bandung.
- <http://nasional.inilah.com/read/detail/1870353/pengamat-pks-menurun-akibat-inkonsistensi#sthash.nhtqzNdK.dpuf>, diakses tanggal 10 November 2015
- <http://garammanis.wordpress.com/2010/12/21/partisipasi-politik-non-muslim-dalam-partai-politik-islam-analisa-terhadap-pk-sejahtera/>